

## Laporan Badan Kepegawaian Daerah Bulan Oktober Tahun 2022

No	Nama	Laporan	Tanggapan	Status
1.	Yogi kusnugroho (raranxxxxxxxx)	Masalah thl non asn.....diskriminasi sopir kenersihan satpam tidak ada kesempatan p3k.....dikecualikan.	terimakasih diteruskan ke bidang yg menangani Mohon maaf, pendataan Non ASN didasari atas Surat dari kementrian PANRB yang sudah banyak besedar dengan kriteria yang ada didalamnya serta mengacu nama Jabatan yang telah diatur dalam Permenpan RB No 41 Tahun 2018 selengkapnya anda dapat melihat terkait Pendataan Non ASN di link berikut <a href="https://linktr.ee/nonasnjateng">https://linktr.ee/nonasnjateng</a> anda juga dapat mendapatkan penjelasan di BKD Kabupaten/Kota tempat anda bekerja Terimakasih	Laporan Selesai
2.	david (No Telepon)	Alamat: Kabupaten/Kota semarang, Kecamatan banyumanik, Kelurahan sambiroto Laporan: Selamat malam bapak gubernur, mohon di bantu bapak terkait hal berikut mohon di kaji kembali tentang pengajian calon pegawai negeri sipil pemerintah provinsi jawa tengah saat ini gaji nya 80% dari gaji, artinya untuk gol 3a gaji sekitar 2.1 jt setiap bulan tanpa TPP, dan untuk gol 2c gaji malah di bawah 2 jt dimana gaji di bawah UMR kota Semarang. cukup berat saat ini untuk menghidupi keluarga dengan gaji seperti yang saya sampaikan, kami sadar mungkin ini bagian dari penyaringan dan penjajakan dari pemprov, kandidat cpns mungkin juga tdk berani secara vocal komplain mengingat beban anggaran pemprov yang tidak mudah saat ini, bukan juga bermaksud memberi beban kpd pemprov, kami siap untuk terus berkontribusi kepada pemprov jateng dan masyarakat jawa tengah jika	diteruskan ke bidang yg menangani Gaji CPNS 80% dari gaji Pokok adalah secara nasional dengan Aturan PP No.7 Tahun 1977 tertuang dlm Pasal 4, namun dlm perkembangannya ada perubahan perubahan yaitu hanya dalam besaran Gaji Pokoknya saja pada perubahan terakhir PP 15 Tahun 2019 ttg perubahan ke 18 atas PP no 7 Tahun 1977 Ttg Peraturan Gaji PNS demikian semoga dapat dipahami Terima kasih	Laporan Selesai

		<p>memang kebijakan tersebut adalah kebijakan yang sudah di kaji secara mendalam. namun demikian mohon kebijaksanaan nya untuk dapat di kaji ulang sistem pengajian nya bapak, atas tindak lanjut dan kajian nya saya ucap kan matur sembah nuwun, salam ??????????????????</p>		
3	<p>anggasepditiyawibowo (No Telepon)</p>	<p>Alamat: Kabupaten/Kota ungaran, Kecamatan ungarantimur, Kelurahan kalongan Laporan: Selamat siang. Saya mau menanyakan kemana kah saya harus melaporkan apabila ada ASN pamali Juana yang berselingkuh dengan istri saya yang saya sebagai pelapor adalah orang sipil biasa.. Mohon informasi nya. Terimakasih sebelumnya.</p>	<p>Terimakasih laporan anda diteruskan ke bidang yang menangani Terimakasih, setelah Kami Hubungi Bpk Angga, dan ditelusuri data PNS Prov. Jateng Ternyata bukan PNS Prov. Jateng Maka selanjutnya di sarankan untuk dapat datang ke Instansi dan dapat melaporkan langsung ke atasannya terimakasih</p>	<p>Laporan Selesai</p>
4	<p>Pns Kerenn (No Telepon)</p>	<p>tolong bkn provinsi jateng perhatikan perkembangan zaman sekarang terkait pakaian dan pendidikan pns. coba liat itu pak jokowi dan pak ganjar sebagai kepala negara dan kepala daerah seringnya di lapangan pakai sepatu kasual sedangkan di peraturan gubernur mengenai pakaian dinas masih disuruh pakai pantovel, berarti kan aturannya perlu di revisi karena sudah tidak sesuai zaman. kabeh di kon pantovel yo susah pas di lapangan. kedua masalah ijin penggunaan gelar kenapa sih sulit banget, alasan di pergub harus sesuai dgn pendidikan pas cpns. Iha pns kuliah pakai biaya sendiri kok ngga pakai uang negara, meningkatkan kompetensi secara sadar diri kalo mengharap tugas belajar banyak syaratnya.</p>	<p>Diteruskan ke Bidang yang menangani Terimakasih Laporrannya, Terkait yang anda tanyakan dapat kami sampaikan sebagai berikut : 1. Terkait Pakaian dinas menjadi Kewenangan Biro Organisasi 2. Ijin Penggunaan Gelar sebagaimana Pergub No. 31 Tahun 2013, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Berharap mendapatkan PNS yang berkualitas dan kompeten dibidangnya sebagaimana Tugas Pokok dan fungsi yang diemban PNS sesuai dengan Jabatannya, dimana Peningkatan Pendidikan yang didapat akan meningkatkan Kompetensi sesuai Jabatan. 3. Apalagi sekarang dengan mengedepankan Jabatan Fungsional, Peningkatan Pendidikan yang sesuai akan meningkatkan Jenjang Karier PNS yang bersangkutan, karena akan menambah Angka kredit (Bila mana tidak sesuai maka tidak dapat menambah angka kredit). 4. Terimakasih atas koreksi, saran dan masukannya, Kami akan selalu update sesuai perkembangan</p>	<p>Laporan Selesai</p>

		<p>coba itu pejabat2 eselon dan kepala daerah pun ijazahnya beda. contoh paling dekat saja pak ganjar ijazahnya SH, MIP. GILIRAN PEJABAT OLEH ENTUK TAPI PNS PELAKSANA GA BOLEH. revisi lah itu pergub tahun 2013 menghambat karir dan kompetensi pegawai2mu sendiri. introspeksi jangan hanya sibuk daily activity saja.</p>	<p>ketentuan perundang-undangan yang ada.</p>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	--